



## 14 Raperda Jadi Target Utama Propemperda 2026



**YOGYAKARTA** – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya untuk menuntaskan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026. Dengan total 14 target Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), alat kelengkapan dewan yang menjalankan fungsi legislasi ini berupaya memastikan seluruh regulasi yang direncanakan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kepastian hukum di kota ini.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Ipung Purwandari, menjelaskan target tahun ini mencatatkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 12 Raperda. Penambahan dua poin krusial ini mencerminkan dinamika kebutuhan regulasi yang semakin kompleks di tingkat lokal, mulai dari isu perlindungan kelompok rentan hingga transformasi digital pemerintah kota. "Target Propemperda ini merupakan hasil kolaborasi antara inisiatif dewan dan usulan eksekutif atau pemerintah kota," tandasnya.

Raperda yang menjadi prakarsa atau inisiatif DPRD mencapai lima Raperda. Masing-masing ialah Raperda Keterbukaan Informasi Publik (Komisi A), Raperda Pemberdayaan Perlindungan dan Pengembangan UMKM (Komisi B), Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Komisi C),



*Jajaran anggota DPRD Kota Yogyakarta Periode 2024-2029.*

Raperda Kota Layak Anak (Komisi D), dan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Bapemperda).

Sedangkan Raperda yang menjadi prakarsa eksekutif berjumlah enam produk hukum di samping tiga Raperda wajib. Masing-masing adalah Raperda Penyelenggaraan Transformasi Digital, Raperda Jaminan Sosial, Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Raperda Penyertaan Modal Bank BPD DIY, dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sedangkan tiga Raperda wajib meliputi APBD Perubahan 2026, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, dan APBD 2027.

"Kami memastikan semua Raperda yang masuk daftar 2026 relevan dengan kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan kota ke depan," ujar Ipung, seraya menambahkan terdapat tiga Raperda yang menjadi cadangan jika terjadi perubahan Propemperda. Ketiganya ialah Raperda Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian dan Pangan), Raperda Rencana 4nduk Pengembangan Kepariwisata Daerah Kota Yogyakarta (Dinas Pariwisata), dan Raperda Keamanan Pangan (Dinas Kesehatan).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta Tri Waluko Widodo, menambahkan pada progres awal tahun ini sudah ada dua Propemperda yang masuk dalam pembahasan. Keduanya ialah Raperda Rencana Perin-

dungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, dan Raperda Penyelenggaraan Transformasi Digital. "Kedua Raperda itu sudah terbentuk panitia khusus (pansus) dan saat ini sedang berjalan melakukan pembahasan. Sebenarnya ada satu pansus lagi yang juga dibentuk, namun itu untuk internal dewan yakni terkait pembahasan pokok pikiran dewan," urai Widodo.

Dirinya mengaku, lembaga dewan tidak ingin membuang waktu guna memacu percepatan kinerja legislasi. Oleh karena itu skema pembahasan Propemperda tidak lagi berbasis target berdasarkan triwulan melainkan kinerja. Sehingga begitu pansus sudah merampungkan pembahasan, maka akan langsung dilanjutkan pembentukan pansus baru. Hal ini lantaran berdasarkan

pengamatannya, semua target Propemperda hampir tidak memiliki dinamika politik yang tinggi. Apalagi ada beberapa produk hukum yang hanya menyesuaikan aturan di atasnya seperti Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan demikian, meskipun target bertambah Bapemperda optimis dapat menyelesaikan seluruh agenda legislasi tepat waktu. Strategi yang diterapkan mencakup penjadwalan ketat dan peningkatan intensitas rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Bapemperda juga menekankan pentingnya kualitas naskah akademik agar Perda yang dilahirkan tidak hanya sekadar tuntas secara kuantitas, tetapi juga aplikatif dan tidak berbenturan dengan aturan

yang lebih tinggi (inkonsistensial).  
 Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Transformasi Digital, Agus Trianto, menjelaskan bahwa penetapan jadwal atau tatakala yang presisi merupakan fondasi krusial dalam menyusun regulasi yang kompleks. Menurutnya, transformasi digital bukan sekadar peralihan teknologi, melainkan perubahan ekosistem pelayanan publik yang memerlukan payung hukum kuat dan adaptif. "Kami memfokuskan pembahasan pada penataan alur waktu agar setiap tahapan pembahasan tidak tergesa-gesa namun tetap efektif. Ketepatan waktu ini penting untuk menjaga kualitas substansi Raperda, mengingat materi yang dibahas sangat dinamis mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini," ujarnya.

Senada juga disampaikan Ketua Pansus Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055, Oleg Yohan, yang tengah melakukan pematangan tahapan kerja. Mengingat Raperda ini merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang akan berlaku selama 30 tahun ke depan, pansus menekankan pentingnya akurasi data dan keterlibatan lintas sektor sejak tahap inisiasi. "Pembahasan pansus ini memang butuh energi ekstra karena akan berlaku untuk 30 tahun ke depan. Mohon kiranya teman-teman anggota bisa mencermati secara mendalam setiap draf yang ada agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berkualitas," tandasnya. (DH)

KR-tatimewa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005